

MAKALAH

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

Disusun guna memenuhi Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Lis Tiara Putri | 2213031001 |
| 2. Marista Febria Safutri | 2313031007 |
| 3. Annisa Luthfiyyah | 2313031010 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul “Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan makalah ini.

Penulis telah berusaha menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan pengetahuan dan referensi yang tersedia. Namun demikian, kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Bandar Lampung, 1 September 2025

Kelompok 1

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Sektor Publik.....	3
2.2 Karakteristik Sektor Publik	4
2.3 Lingkungan Sektor Publik.....	5
2.4 Faktor yang mempengaruhi Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik.....	7
2.5 Implikasi Karakteristik & Lingkungan terhadap Pengelolaan Sektor Publik	8
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran.....	11
STUDI KASUS.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan pengelolaan sumber daya yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, sektor publik lebih menekankan pada pelayanan, kesejahteraan, dan pemerataan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sektor public menjadi hal yang esensial untuk melihat kondisi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Dalam praktiknya, sektor publik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan sektor lain. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh sistem politik, regulasi, serta kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Sektor publik juga menuntut adanya tata kelola yang baik agar tujuan dapan tercapai secara efektif dan efisien.

Namun, sering kali muncul tantangan dalam pengelolaan sektor publik, seperti keterbatasan sumber daya, dan rendahnya transparansi. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini disusun untuk membahas pengertian sektor publik, karakteristik dan lingkungannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi dari karakteristik dan lingkungan tersebut terhadap pengelolaan sektor publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari sektor publik?
2. Bagaimana karakteristik sektor publik?
3. Bagaimana lingkungan sektor publik?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik dan lingkungan sektor publik?
5. Bagaimana implikasi karakteristik dan lingkungan terhadap pengelolaan sektor publik?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian sektor publik.
2. Menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh sektor publik.
3. Mendeskripsikan lingkungan sektor publik.
4. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi karakteristik dan lingkungan sektor publik.
5. Menganalisis implikasi karakteristik dan lingkungan terhadap pengelolaan sektor publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun Sulistyowati, & Purwanigroho, 2011). Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities). Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu.

Akuntansi Sektor Publik. Istilah Akuntansi sering digunakan oleh dunia pendidikan dan perusahaan pada saat ini, namun secara umum sebagian besar mengartikan bahwa akuntansi hanya mempunyai satu arti saja. Sebenarnya ada perbedaan pengertian Akuntansi dalam beberapa hal seperti:

- a. Akuntansi Keuangan (Komersial).
- b. Akuntansi Biaya
- c. Akuntansi Manajemen
- d. Akuntansi Anggaran
- e. Akuntansi Pajak
- f. Akuntansi Sektor Publik, yang terdiri atas:
 1. Akuntansi Pemerintahan, terdiri atas: akuntansi pusat dan akuntansi daerah.
 2. Akuntansi Rumah Sakit.
 3. Akuntansi Pendidikan, dan sebagainya.
 4. Akuntansi LSM.

Kali ini kita membahas tentang Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik. Publik = masyarakat atau umum, jika organisasi publik (entitas}nya adalah pemerintah maka dalam hal ini penerima dana masyarakat adalah "pemerintah", dan dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat umum (masyarakat) dan negara, maka dana yang digunakan pemerintah tersebut harus dilaporkan kepada rakyat dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban melalui sebuah proses akuntansi yaitu akuntansi sektor publik yang dalam hal ini adalah Akuntansi Pemerintahan.

Dari persepektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik (Mahsun Sulistyowati, &Purwanigroho, 2011) Proses akuntansi yang digunakan disini, untuk penyusun 2 pelaporan pertanggungjawabannya adalah PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11.

2.2 Karakteristik Sektor Publik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Menurut Haryanto, dkk. (2007) komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP), struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mala uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, sektor informal.

2. Faktor Politik.

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain, hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi Negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan

3. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain, keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, histories, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan.

4. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain, pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan.

2.3 Lingkungan Sektor Publik

Sektor publik tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Lingkungan tersebut mencakup berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi bagaimana cara organisasi publik beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor publik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan sektor privat karena kinerjanya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi.

Beberapa dimensi lingkungan sektor publik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Politik

Sektor publik erat kaitannya dengan dinamika politik, seperti pemilihan umum, sistem pemerintahan, kebijakan partai politik, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Maolani (2023) menekankan bahwa keputusan politik sering memengaruhi prioritas anggaran dan arah pembangunan. Hal ini membuat pengelolaan sektor publik harus adaptif terhadap perubahan kepemimpinan dan arah kebijakan pemerintah.

2. Lingkungan Ekonomi

Kondisi perekonomian nasional, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta penerimaan negara dari pajak, memengaruhi kemampuan sektor publik dalam menyediakan layanan. Suryana dkk. (2024) telah melakukan studi tentang analisis Value for Money di Kota Depok menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran agar tetap efisien dan efektif.

3. Lingkungan Sosial dan Demografi

Perubahan struktur masyarakat, misalnya urbanisasi, meningkatnya angka pendidikan, serta pertumbuhan penduduk, menimbulkan tuntutan yang lebih besar terhadap sektor publik. Semakin beragam kebutuhan masyarakat, semakin besar pula kompleksitas pelayanan yang harus diberikan.

4. Lingkungan Hukum dan Regulasi

Sektor publik terikat pada berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, sistem akuntabilitas publik, hingga peraturan daerah. Penelitian Puyo (2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berbasis regulasi memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, regulasi yang terlalu banyak juga bisa membuat birokrasi menjadi kaku.

5. Lingkungan Teknologi

Digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengelolaan sektor publik. Implementasi e-government dan keterbukaan data publik (open data) memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Tim Peneliti (2024), bahwa adopsi teknologi informasi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lingkungan sektor publik adalah sebuah ekosistem yang kompleks, di mana politik, ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi saling berkaitan. Setiap perubahan dalam salah satu aspek lingkungan tersebut akan memengaruhi kinerja, strategi, serta tata kelola organisasi sektor publik.

2.4 Faktor yang mempengaruhi Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Karakteristik sektor publik yang berbeda dengan sektor privat seperti orientasi pada pelayanan masyarakat, sumber pendanaan yang mayoritas berasal dari pajak, serta kewajiban akuntabilitas kepada publik tidak muncul begitu saja. Karakteristik tersebut terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor tersebut meliputi regulasi dan tata kelola yang mengikat, sistem keuangan dan desentralisasi fiskal, perkembangan teknologi dan inovasi, kualitas sumber daya manusia, hingga dinamika sosial dan tuntutan masyarakat. Dengan kata lain, karakteristik sektor publik merupakan hasil interaksi antara kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, kapasitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Beberapa faktor kunci yang memengaruhi karakteristik dan lingkungan sektor publik di Indonesia antara lain:

1. Faktor Regulasi dan Tata Kelola

Maolani (2023), menjelaskan sistem akuntabilitas publik dan prinsip Good Governance menjadi faktor utama yang memengaruhi karakteristik sektor publik. Regulasi yang mengikat menjadikan sektor publik memiliki orientasi yang kuat pada transparansi dan akuntabilitas, berbeda dengan sektor privat yang lebih fleksibel.

2. Faktor Keuangan dan Desentralisasi Fiskal

Pendanaan sektor publik sebagian besar berasal dari pajak dan transfer fiskal. Penelitian Suryana, Santoso & Lestari (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan keuangan daerah mendorong penggunaan pendekatan Value for Money untuk memastikan dana publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan adanya desentralisasi fiskal, perbedaan kapasitas keuangan antar daerah juga memengaruhi kualitas layanan publik.

3. Faktor Teknologi dan Inovasi

Puyo (2023) menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi berperan penting dalam membentuk lingkungan sektor publik. Digitalisasi akuntansi dan pelayanan publik memungkinkan birokrasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Faktor ini memengaruhi karakteristik sektor publik untuk semakin berorientasi pada transparansi dan responsivitas.

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Sektor publik dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kualitasnya sangat menentukan efektivitas layanan. Menurut Tim Peneliti (2024), penerapan prinsip Good Governance tidak akan berjalan optimal tanpa adanya SDM yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi yang kaku dapat berubah menjadi lebih adaptif jika didukung oleh kualitas SDM yang baik.

5. Faktor Sosial dan Tuntutan Publik

Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Tuntutan akan layanan cepat, mudah, dan murah mendorong sektor publik untuk melakukan reformasi birokrasi. Faktor ini memperkuat karakteristik sektor publik yang sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Karakteristik dan lingkungan sektor publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor regulasi, keuangan, teknologi, SDM, serta tuntutan sosial. Faktor-faktor ini membuat pengelolaan sektor publik harus lebih akuntabel, efisien, dan inovatif, agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

2.5 Implikasi Karakteristik & Lingkungan terhadap Pengelolaan Sektor Publik

Dalam akuntansi sektor publik, karakteristik (sumber dana dari pajak/transfer, tujuan pelayanan, multi-stakeholders) dan lingkungan (regulasi, teknologi, budaya organisasi, good governance) membawa implikasi penting terhadap pengelolaan sektor publik, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas.

a. Perencanaan & Penganggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan implikasi langsung dari karakteristik sektor publik yang berorientasi pelayanan. Semakin jelas sasaran anggaran, semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi. Studi empiris menemukan bahwa kejelasan target anggaran dan penerapan akuntansi publik secara signifikan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sari & Dewi, 2024).

b. Implementasi SAP Akrua

Karakteristik sektor publik yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi menuntut penerapan SAP berbasis akrual. Implikasinya: laporan keuangan pemerintah harus tidak hanya menampilkan realisasi anggaran (LRA), tetapi juga menyajikan Laporan Operasional (LO), Neraca, LPE, LPSAL, dan CaLK. Penelitian Putra & Safitri (2024) menunjukkan bahwa kendala SDM dan budaya kas-oriented berimplikasi pada lambatnya adopsi SAP akrual, sehingga kualitas laporan keuangan belum optimal.

c. Sistem Pengendalian Internal (SPI) & Audit

Lingkungan sektor publik yang kompleks menuntut adanya SPI yang kuat agar laporan keuangan dapat diandalkan. Implikasinya: pemerintah harus mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan melakukan rekonsiliasi anggaran–akuntansi untuk memastikan keandalan data. Penelitian Hidayat & Lestari (2024) membuktikan bahwa penerapan SPI berimplikasi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Good Governance dan Kinerja Instansi

Karakteristik publik yang menekankan pertanggungjawaban demokratis dan lingkungan regulatif membawa implikasi pada tuntutan good governance. Implikasinya: akuntansi sektor publik harus mendukung transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sari & Nugroho (2023) menemukan bahwa akuntansi sektor publik yang diimplementasikan bersama dengan pengawasan internal berimplikasi

positif terhadap terwujudnya good governance, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.

e. Reformasi Digital & Transparansi

Lingkungan digital mendorong integrasi e-budgeting dan e-reporting, yang mengimplikasikan perlunya sistem informasi akuntansi modern. Implikasinya: pengelolaan sektor publik harus menyesuaikan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) agar transparansi dan keterbukaan data publik meningkat. Rahmawati & Prasetyo (2025) menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting secara langsung memperbaiki transparansi dan pengendalian anggaran pemerintah daerah.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Karakteristik dan lingkungan sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui orientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan kepentingan umum yang lebih menekankan pada keuntungan. Lingkungan sektor publik tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan perkembangan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dinamika dalam lingkungan tersebut menuntut sektor publik untuk selalu beradaptasi, baik dari sisi regulasi, pengelolaan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi digital. Implikasi dari kondisi tersebut tercermin dalam praktik akuntansi sektor publik yang semakin menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan sektor publik di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, sehingga birokrasi mampu merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Pemerintah perlu mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, serta mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah sangat penting agar prinsip akuntabilitas dapat terwujud.

STUDI KASUS

Transparansi Anggaran di Pemerintah Kota Sejahtera

Pemerintah Kota Sejahtera baru saja meluncurkan aplikasi e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melihat secara langsung rencana anggaran, realisasi belanja, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.

Namun, di lapangan muncul beberapa masalah. Pertama, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbiasa dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Banyak pegawai yang masih berpikir dengan logika cash basis sehingga sering salah mencatat transaksi. Kedua, ada resistensi dari sebagian pejabat yang merasa bahwa sistem ini membuat mereka sulit "mengatur" anggaran sesuai kepentingan pribadi. Ketiga, masyarakat umum belum semuanya melek teknologi, sehingga pemanfaatan aplikasi masih rendah.

Di sisi lain, sistem ini justru mendapat apresiasi dari aktivis masyarakat sipil karena dianggap sebagai langkah maju dalam mewujudkan good governance. Pemerintah pusat pun menjadikan Kota Sejahtera sebagai percontohan penerapan akuntansi sektor publik berbasis transparansi digital.

Pertanyaan

1. Berdasarkan pengertian dan karakteristik sektor publik, jelaskan mengapa Pemerintah Kota Sejahtera wajib menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan APBD, bukan lagi berbasis kas!
2. Dilihat dari faktor lingkungan dan karakteristik sektor publik, apa saja hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Sejahtera dalam penerapan aplikasi e-budgeting? Berikan contoh nyata dari cerita di atas!
3. Implikasi terhadap pengelolaan sektor publik: Menurut Anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi resistensi internal pegawai serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini? Kaitkan jawaban dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, dkk. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (Ed.1, Cet. 1). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hidayat, A., & Lestari, F. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(2), 145–159.
- Maolani, D.Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika*, 18 (2), 45-56.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Putra, Y. D., & Safitri, R. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Daerah (JUBID)*, 6(2), 115–127.
- Puyo, M. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas. *Jurnal STIE SBI*, 5(1), 12-20.
- Rahmawati, N., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi E-Budgeting sebagai Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Studi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Psikologi dan Ilmu Sosial*, 14(1), 22–34.
- Sari, P. A., & Nugroho, T. (2023). Peran Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah (JAKA)*, 12(3), 201–215.
- Suryana, A., Santoso, B., & Lestari, R. (2024). Analisis Value for Money terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2021–2023. *Jurnal Anggaran*, 2(2).
- LPPM Universitas Serang Raya (2024). Pengaruh Implementasi Good Government Governance pada Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi*, 9 (1), 33-45.